

OPTIMALISASI TATA KELOLA SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN GORONTALO

Jurisman Kadji

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ABSTRAK

Pemulihan pariwisata ini juga hendaknya dibutuhkan adanya pendekatan atau mekanisme yang tepat melalui penumbuhan keterlibatan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan seluruh komponen pariwisata dan masyarakat secara keseluruhan. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata. Belum adanya pementasan atau pagelaran tentang budaya di Kabupaten Gorontalo. Belum adanya pelatihan ketrampilan masyarakat untuk menghasilkan kerajinan atau produk-produk seperti makanan yang dapat menunjang kepariwisataan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama di bidang kepariwisataan. Pegawai belum menguasai teknologi informasi, kurangnya sosialisasi pengurusan rekomendasi bagi para pengusaha jasa yang bergerak di bidang pariwisata, serta terbatasnya jumlah perangkat teknologi (komputer). Perlu menyediakan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan pariwisata. Perlunya menampilkan budaya yang khas dari Kabupaten Gorontalo. Lebih mendorong warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam mempromosikan pariwisata. Mengikutsertakan pegawai dalam mengikuti seminar maupun lokakarya atau pendidikan dan pelatihan terutama di bidang teknologi yang berkaitan dengan kepariwisataan. Perlu ada kerjasama dengan pihak swasta khususnya yang bergerak dibidang kepariwisataan untuk peningkatan serta optimalisasi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Gorontalo.

Kata kunci: Optimalisasi, Pariwisata, Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Pemulihan pariwisata harus kembali disusun dan direncanakan sedemikian rupa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, agar nantinya hasil dan tujuan yang diharapkan, yaitu pulihnya kondisi pariwisata dan perekonomian seperti sedia kala dapat tercapai. Dalam kondisi pariwisata yang demikian terpuruk ini diperlukan adanya suatu upaya pemulihan (*recovery*) yang optimal, yang tentunya harus diawali dengan adanya perencanaan yang matang, sehingga dalam pelaksanaan nantinya bisa berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam perencanaan pemulihan pariwisata ini juga hendaknya dibutuhkan adanya pendekatan atau mekanisme yang tepat melalui penumbuhan keterlibatan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan seluruh komponen pariwisata dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, bila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Gorontalo dalam hal upaya-upaya atau strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dalam upayanya memulihkan kondisi pariwisata di Kabupaten Gorontalo, kiranya masih perlu di kaji secara mendalam. Sehingga dalam penelitian ini peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tentang Optimalisasi Tata Kelola Sektor Pariwisata Di Kabupaten Gorontalo melalui Perencanaan Pembangunan Pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo sebagai upaya pemulihan Pariwisata yang sedang terpuruk dalam perspektif emansipatif.

KAJIAN TEORI

Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Umum Politik Dan Hukum “optimalisasi” berasal dari kata optimal yaitu sesuatu hal yang terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Sedangkan optimalisasi merupakan suatu proses untuk membuat sesuatu menjadi optimal. Optimalisasi adalah merupakan sesuatu hal yang paling tinggi atau tertinggi, serta paling menguntungkan. Mengoptimalkan merupakan upaya, proses, cara, dan perbuatan yang menjadikan sesuatu menjadi yang paling baik, tertinggi dan paling menguntungkan. Sedangkan optimum adalah kondisi yang terbaik atau yang paling menguntungkan (Rumokoy, 2010:566).

Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” bisa disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 2000). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Nanang Fattah, (2004: berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengesahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, mengawasi dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian Pariwisata

Menurut undang – undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dimaksud dengan wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan, Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Menurut Yoeti, (2006) secara etimologis kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu : “Pariwisata terdiri dari suku kata “pari” dan “wisata”. Pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar lengkap, dan wisata yang berarti perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain”.

Sedangkan menurut Spillane (2000) mengemukakan sebagai berikut :“Pariwisata adalah suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dalam lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam, dan ilmu”.

Komponen Pariwisata

Sistem kepariwisataan terdapat 3 (tiga) pilar utama yang menentukan keberhasilan pembangunan kepariwisataan di suatu daerah. Sama dengan tiga komponen dalam pembangunan suatu daerah, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005 : 96), bahwa : “... dalam sistem pariwisata secara umum, terdapat tiga pilar utama yang menggerakannya, yaitu :

1. Masyarakat, yaitu : masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumberdaya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan ;
2. Swasta (investor/ Industri Pariwisata), yaitu : industri pariwisata, seperti asosiasi usaha pariwisata, dan para pengusaha pariwisata sendiri ;
3. Pemerintah, yaitu : Pemerintah dalam berbagai wilayah administrasi, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan seterusnya.”

Khusus untuk Industri Pariwisata sendiri dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok utama, seperti pendapat yang diuraikan oleh Freyer dalam Damanik dan Weber (2006 : 20), yaitu : “Semua usaha yang menghasilkan barang atau jasa bagi pariwisata, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan utama, yaitu :

1. Pelaku Langsung, yaitu : usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah : hotel, restoran, biro perjalanan, dan lain-lain.
2. Pelaku Tidak Langsung, yaitu : usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya : usaha kerajinan tangan, penerbit panduan wisata, dll.”

Perencanaan Pembangunan Pariwisata

Sama seperti perencanaan pembangunan daerah secara umum, dalam perencanaan pembangunan pariwisata juga memerlukan adanya sasaran yang ingin dicapai nantinya. Dan dalam menentukan sasaran melalui sebuah proses perencanaan tersebut dibutuhkan adanya

pendekatan yang tepat dalam penyusunannya. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti (2001 : 51), bahwa :Dalam prakteknya, ada dua pendekatan yang biasa digunakan dalam menetapkan sasaran yang dianggap relevan dengan kondisi pariwisata daerah, yaitu :

1. *Top-down approach.*
2. *Flexible and balance*

Demikian juga dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, yang menyatakan bahwa :”Dalam penyelenggaraan pengembangan pariwisata, harus dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- b) Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- c) Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- d) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan
- e) Keamanan dan ketertiban masyarakat.”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya, Proses Dan Cara Yang Digunakan Pemerintah Dalam Tata Kelola Sektor Pariwisata

Upaya yang disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah juga untuk melakukan perubahan terhadap sektor pariwisata menuju ke arah yang lebih baik.

Hampir seluruh obyek wisata di Kabupaten Gorontalo belum memiliki fasilitas wisata yang dapat mendukung kegiatan wisata oleh pengunjung, terkecuali di obyek wisata pemandian Pentadio Resort. Wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengmb. Prod. Wisata & Sagra Wisata **IH** menyatakan bahwa :“betul, memang belum seluruhnya obyek wisata di Kabupaten Gorontalo dilengkapi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata, sehingga para pengunjung belum menikmati keunikan-keunikan yang ada di obyek wisata yang dikunjungi”. (Wawancara, 26 Mei 2014).

Fasilitas/sarana penunjang kegiatan pariwisata seperti hotel, restoran, biro perjalanan wisata, toko souvenir, juru foto, dan pemandu wisata belum tersedia di Kabupaten Gorontalo. Para pengunjung atau wisatawan masih menggunakan fasilitas-fasilitas pendukung di Kota Gorontalo, seperti hotel, toko sovenir, dll.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah yang budayanya tidak sedikit, namun selama ini belum terdapat acara-acara pesta budaya yang dapat menarik kedatangan wisatawan dari luar daerah seperti pagelaran seni dan budaya. Masih menurut Kepala Seksi Pengmb. Prod. Wisata & Sagra Wisata **IH** menyatakan bahwa :“sebenarnya pengembangan pariwisata telah lama dilakukan oleh masyarakat, baik oleh kepala adat yang berkewajiban menjaga budaya Kabupaten Gorontalo, maupun oleh individu dan kelompok. (Wawancara, 26 Mei 2014).

Hal ini juga diungkapkan oleh **AWL** salah seorang tokoh adat di Kabupaten Gorontalo, beliau menyatakan bahwa :“yaa...budaya yang ada di Kabupaten Gorontalo yang merupakan

salah satu akar budaya dari Gorontalo yang antara lain berupa tarian, lagu, dan pakaian belum pernah di pentaskan dalam pagelaran ataupun festival seni dan budaya yang bisa digelar dalam setiap tahunnya,” (Wawancara, 22 April 2014).

Selanjutnya menurut **SRK** salah seorang tokoh adat di Kabupaten Gorontalo, beliau menyatakan bahwa :“saya belum melihat adanya pelatihan keterampilan masyarakat untuk menghasilkan kerajinan atau produk-produk makanan yang dapat menunjang kepariwisataan sehingga kerajinan tangan dan makanan khas daerah belum banyak ditemui”. (Wawancara, 3 Mei 2014).

Pengembangan pariwisata mempunyai peran sebagai penggerak roda perekonomian daerah, mendorong pendayagunaan produksi nasional, menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pengembangan kepariwisataan daerah belum di dukung sarana dan prasarana yang memadai. Pengembangan potensi pariwisata sangat ditentukan oleh suatu kondisi dan lingkungan sesuai dengan karakteristik masing – masing daerah dan masyarakat. Untuk itu program pengembangan pariwisata berbasis lokal untuk menggerakkan perekonomian di Daerah yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dirasakan perlu adanya revisi terhadap Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo. Wawancara peneliti dengan **SM** (Kepala Dinas PRBUDKOMINFO Kabupaten Gorontalo) menyatakan bahwa: “pemerintah saat ini telah memikirkan perlu adanya peningkatan pembinaan/perhatian terhadap aspek kepariwisataan (seni dan budaya), peningkatan sumber daya manusia yang profesional khususnya dibidang kepariwisataan itu sendiri, perlu intensitas promosi kepariwisataan serta peningkatan terhadap fasilitas pendukung dan keamanan wisata. (Wawancara, 3 Juni 2014)

Selanjutnya Kepala Dinas PARBUDKOMINFO menambahkan bahwa :“Output yang diharapkan adalah bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gorontalo, dapat pula mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan yaitu terwujudnya pembinaan budaya daerah dan pengembangan pariwisata Kabupaten Gorontalo. (Wawancara, 3 Juni 2014)

Hasil wawancara peneliti dengan **IH** Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata & Sapa Wisata Kabupaten Gorontalo beliau menyatakan bahwa :”Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan wisata. Sistem rekrutmen “Visit to campus”, diutamakan orang yang prestasi. Mengadakan MOU dengan lembaga pendidikan. Membuka peluang tugas belajar/ijin belajar serta mengadakan program magang”. (Wawancara, 26 Mei 2014)

Upaya pengenalan terhadap objek wisata tidak berlangsung begitu saja, tetapi perlu dikenalkan dan disuguhkan dengan sebaik mungkin. Berbagai jalur atau media dapat digunakan, sehingga orang-orang/calon wisatawan mengetahui dan terdorong untuk berkunjung pada tempat tertentu yang dianggap menarik.

Seperti yang dikemukakan oleh SN seorang tukang bontor yang sering menunggu penumpang di area objek wisata Menara Keagungan (Tower Pakaya), beliau berpendapat bahwa : “Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan lagi promosi kepada orang-orang di luar daerah, mungkin dengan menambah fasilitas yang bisa menjadi daya tarik tersendiri dari objek wisata yang satu ini, karena sejauh yang saya lihat, yang mejadi daya tarik orang-orang itu hanya taman menaranya saja, bukan menaranya”. (17 Mei 2014)

Keingintahuan merupakan salah satu kunci utama memotivasi orang-orang untuk berkunjung ke Kabupaten Gorontalo. Dalam upaya mengenalkan keindahan alam, seni budaya dan objek wisata di Kabupaten Gorontalo, telah lama Dinas PARBUDKOMINFO melakukan kegiatan yang berkaitan dengan promosi. Untuk menyukkseskan berbagai program daerah dan program pariwisata nasional. Dinas PARBUDKOMINFO seharusnya bekerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri mencoba mengenalkan berbagai potensi wisata dan seni budaya Kabupaten Gorontalo melalui pembuatan brosur, mengikuti pameran, pengiriman duta seni budaya ke berbagai daerah dan luar negeri serta banyak usaha lainnya.

Konsep pengaturan ruang untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Gorontalo diarahkan untuk membentuk suatu kawasan wisata yang terintegrasi dan terhubungkan satu obyek dengan lainnya melalui jaringan infrastruktur yang telah ada. Berdasarkan kondisi sebaran dan tipe obyek wisata yang ada di wilayah Kabupeten Gorontalo, maka kawasan obyek wisata di Kabupaten Gorontalo dibagi kedalam 4 zona pengembangan kawasan wisata yaitu :

- a. Zona wisata yang terdiri dari obyek wisata Danau Limboto, Tempat Pemandian Pentadio Resort, Tempat Pemandian Taluhu Barakati. Zona ini meliputi kawasan Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Limboto, Kecamatan Batudaa.
- b. Zona wisata alam, yaitu terdiri dari kawasan obyek wisata alam Gua Ular, di Kecamatan Batudaa, Suaka Margastawa Nantu, dan Taman Cagar Alam Tanggale yang berada di Kecamatan Tibawa
- c. Zona wisata Adat, dan umum yang teletak di dalam wilayah kota yaitu terdiri dari Bantayo Poboide, Menara Keagungan di Kecamatan Limboto. Lapangan Pacuan Kuda Yosonegor. Kawasan wisata sejarah yaitu Museum Soekarno di Kecamatan Batudaa serta Kawasan wisata Religi Bongo di Kecamatan Batudaa Pantai.
- d. Zona wisata budaya, yaitu Bordir Krawang dan Kopian Keranjang.

Perencanaan merupakan salah satu cara untuk menentukan arah strategi pengembangan pariwisata di suatu daerah. Perencanaan pembangunan suatu daerah akan secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah daerah, dan melaksanakannya dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia, sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Uraian tersebut diatas menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah haruslah memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks dan prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya keuangan serta sumber daya sosial dan budaya. Hal yang sama dengan sendirinya juga berlaku pada penentuan dan penerapan suatu strategi pembangunan yang

merupakan salah satu bagian dari sebuah proses perencanaan pembangunan suatu daerah, yang tentunya juga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh potensi dan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh daerah bersangkutan, sebagai modal utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaannya.

Bila dikaitkan dalam konteks pembangunan daerah khususnya bidang pariwisata, dalam situasi keterpurukan yang dialami oleh sektor pariwisata di Kabupaten Gorontalo, maka beberapa tahapan kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk memulihkan kondisi kepariwisataan di daerahnya, merupakan suatu strategi pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh sektor pariwisata daerahnya. Karena di dalamnya terdapat beberapa kebijakan dan program kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Gorontalo dengan memanfaatkan dan memaksimalkan setiap potensi dan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **SM** Kepala Dinas PARBUDKOMINFO Kabupaten Gorontalo, menyatakan bahwa : “saat ini permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PARBUDKOMINFO adalah kurangnya sarana dan prasarana wisata, rendahnya kualitas sumber daya manusia kepariwisataan, masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun citra pariwisata, masih kurangnya produk wisata, belum optimalnya promosi dan informasi kepariwisataan, masih rendahnya networking antara wilayah”. (Wawancara, 3 Juni 2014)

Selanjutnya menurut beliau bahwa permasalahan yang dikemukakan di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh atau solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut adalah : “perlunya peningkatan sarana dan prasarana wisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, perlunya penyuluhan sadar wisata, menciptakan produk-produk wisata, pengadaan bahan promosi pariwisata dan perlunya jaringan kerja. (Wawancara, 3 Juni 2014)

Secara umum formulasi yang dikembangkan untuk menindaklanjuti isu-isu penting penyelenggaraan tugas adalah dengan peningkatan sarana dan prasarana destinasi pariwisata dan perluasan jaringan kerjasama dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan aparat dan masyarakat.

Sehingga dari uraian tersebut dapat dilihat, bahwa strategi yang disusun dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengatasi keterpurukan sektor pariwisata daerahnya, akan terdiri dari beberapa tahapan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat.

Penentuan strategi pembangunan pariwisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo tersebut di atas, juga telah memiliki tujuan yang pasti, yaitu : pulihnya kondisi pariwisata di Kabupaten Gorontalo sebagai sektor andalan dalam menunjang pembangunan di daerah tersebut.

Bila ditinjau dari tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, penetapan strategi pembangunan merupakan salah satu tahapan yang mesti dilalui oleh suatu daerah, seperti halnya Kabupaten Gorontalo dalam upayanya memulihkan kondisi pariwisata daerahnya. Blakely dan Kuncoro (2004:49), menyatakan bahwa : “Tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, berdasarkan urutan pentahapan adalah, sebagai berikut : (i)

pengumpulan dan analisis data, (ii) pemilihan strategi pembangunan daerah, (iii) pemilihan proyek pembangunan, (iv) pembuatan rencana tindakan, (v) penentuan rincian proyek, (vi) implementasi.”

Sehingga bila dilihat dari proses perencanaan pembangunan daerah, maka akan terlihat bahwa strategi pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika, dalam mengupayakan pemulihan sektor pariwisata daerahnya, peneliti rasa telah memenuhi seluruh tahapan di atas.

Secara teknisnya, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan terkait, diperoleh informasi bahwa, strategi pembangunan pariwisata yang ditetapkan tersebut semuanya telah tertuang dan menjadi satu kesatuan dalam dokumen perencanaan pembangunan pariwisata Kabupaten Gorontalo baik dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Gorontalo maupun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo. Di mana tentunya keduanya telah melalui proses dan tahapan yang cukup panjang mulai dari tahapan identifikasi masalah dan pengumpulan data sampai kepada tahap implementasi dan evaluasi pelaksanaannya.

Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Dalam Merealisasikan Pembangunan Pariwisata

1. Faktor Lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek yaitu pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi (contoh: kondisi ekonomi dan pasar, peraturan pemerintah), yang kedua, adalah lingkungan intern, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentris, orientasi pada prestasi) yang sebelumnya telah ditunjukkan mempengaruhi hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh: sikap kerja, prestasi).

Faktor lingkungan di sini dapat diinterpretasikan sebagai berikut : a) apakah lingkungan (obyek wisata) tersebut layak dikembangkan dan b) apakah pengembangan obyek wisata tersebut tidak merusak lingkungan di sekitarnya tetapi sebaliknya dapat memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar obyek wisata yang dikembangkan.

Faktor Lingkungan ini sangat penting sifatnya karena di dalamnya tercakup beberapa aspek yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004 : 16 – 24), yaitu : aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi dan aspek politik. Pengembangan pariwisata mempunyai peran sebagai penggerak roda perekonomian daerah, mendorong pendayagunaan produksi nasional, menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pengembangan kepariwisataan daerah belum di dukung sarana dan prasarana yang memadai. Pengembangan potensi pariwisata sangat ditentukan oleh suatu kondisi dan lingkungan sesuai dengan karakteristik masing – masing daerah dan masyarakat. Untuk itu program pengembangan pariwisata berbasis lokal untuk

menggerakkan perekonomian di Daerah yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan.

Dinas Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah kabupaten Gorontalo, dan memiliki peran penting dalam mewujudkan visi misi kabupaten Gorontalo sehat, cerdas, kreatif, dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Sebagai langkah untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Gorontalo tersebut, maka perlu ditetapkan rencana kerja yang mendukung terwujudnya visi misi tersebut. Dengan ditetapkannya rencana kerja, maka diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan proses kegiatan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah serta potensi, peluang dan tantangan atau kendala yang mungkin terjadi.

Tersedianya suatu dokumen yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah, perencanaan arah kebijakan, hingga pemilihan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan SKPD.

2. Sumber Daya Manusia Perencana

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004 : 23), yang mengungkapkan hubungan antara politik dengan pembangunan, yang salah satu di antaranya adalah dalam hal : "... komitmen dari elit kekuasaan/pemerintahan terhadap proses pembangunan dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling terkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat." Faktor sumber daya perencana juga memegang peran yang sangat penting. Sebab perencana yang menguasai bidang pekerjaannya akan dapat membuat perencanaan yang komprehensif sehingga pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dan memberi manfaat yang optimal sesuai dengan kondisi yang ada.

Pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah sebaiknya dilakukan dengan pola kompetensi, yaitu suatu konsep kebutuhan SDM yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan peran dalam menjalankan jabatan, fungsi, tugas, pekerjaan yang sejalan dengan target yang ingin dicapai bersama, dalam hal ini termasuk menempatkan orang sesuai dengan keahliannya.

Selain itu masih perlu dilakukan upaya pengembangan SDM secara formal, misalnya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti kursus singkat, training, lokakarya, pendidikan lebih tinggi, studi kasus berorientasi hasil dan berbagai jenis pendidikan formal lainnya.

Apapun jenis pendidikan formal untuk peningkatan aparatur pemerintah dari semua SKPD terkait sebaiknya lebih diarahkan untuk menjawab serangkaian pertanyaan dalam upaya

peningkatan pelayanan bidang pariwisata, misalnya bagaimana strategi untuk mengoptimalkan obyek-obyek wisata, bagaimana pelayanan kesehatan, keamanan, penyediaan makanan dan berbagai fasilitas lainnya, bagaimana pemberdayaan industri kerajinan masyarakat untuk mendukung sektor tersebut serta apa upaya yang perlu ditempuh untuk dapat menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Kualitas sumber daya aparatur yang didukung oleh teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan aparatur baik dalam pengelolaan administrasi maupun pelayanan umum. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi seperti pernyataan responden **IH** Kepala Seksi Pengembangan Produk Wisata & Sapra Wisata saat ditemui peneliti di ruang kerjanya beliau menyampaikan bahwa: "kalau saat ini memang masih banyak pegawai yang belum menguasai teknologi informasi, sehingga pengelolaan data dan administrasi masih dilakukan secara manual. Juga kurangnya pelatihan akses teknologi informasi dan terbatasnya jumlah perangkat komputer. (Wawancara, 26 Mei 2014)

Masih menurut beliau bahwa yang menjadi hambatan dan kendala lainnya adalah : "kurangnya sosialisasi pengurusan rekomendasi bagi para pengusaha jasa warnet/telekomunikasi, tempat hiburan, cafe dan pedagang kuliner. Belum adanya SOP bagi pengurusan izin yang membutuhkan rekomendasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika. (Wawancara, 26 Mei 2014)

Permasalahan yang dihadapi yakni kurangnya kemauan aparatur dalam mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi informasi, juga kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam melegalkan izin usahanya.

Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Dinas Parbudkominfo Kabupaten Gorontalo sebagai suatu hal yang akan menjadi langkah antisipatif yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknologi informasi
2. Menambah jumlah perangkat komputer yang mendukung tercapainya tertib administrasi.
3. Melakukan pendataan jenis usaha para pengusaha jasa warnet/telekomunikasi, tempat hiburan, cafe dan pedagang kuliner.
4. Melakukan sosialisasi pengurusan izin dan rekomendasi usaha bagi para pengusaha jasa warnet/telekomunikasi, tempat hiburan, cafe dan pedagang kuliner.

Peningkatan pemanfaatan media informasi kepada masyarakat ditujukan untuk pemerataan informasi pembangunan daerah secara komprehensif . Namun hal ini belum tercapai seperti yang diharapkan. Peningkatan pemanfaatan media informasi kepada masyarakat untuk pemerataan informasi, indikatornya adalah jumlah leaflet, jumlah pengguna Media Center. Hal ini menunjukkan target capaian cukup signifikan, namun jumlah pengguna Media Center dari kalangan umum masih rendah.

3. Sistem Yang Digunakan

Peran dan fungsi utama pemerintah daerah pada dasarnya adalah merumuskan perencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemudian bersama-sama dengan DPRD Kabupaten menetapkan kebijakan sebagai pegangan semua pihak dalam mengimplementasikan sasaran yang ingin dicapai, demikian juga dalam konteks peningkatan SDM, peran utama

pemerintah adalah menetapkan grand strategi (strategi besar) dan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk memandu pelaksanaan misi tersebut. Dalam upaya untuk mengintegrasikan perencanaan SDM ke dalam perencanaan strategis, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

Pertama, pengembangan SDM untuk mendukung sektor pariwisata seharusnya dipikirkan kedalam formulasi sebuah rancangan pengembangan bisnis, pola yang digunakan adalah pola pengembangan SDM suatu perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Kedua, harus dipandang sebagai bisnis jangka panjang terkait dengan misi pembenahan serta mengantisipasi datangnya persaingan SDM lokal di pasar global.

Ketiga, harus dituangkan kedalam tiga tingkatan strategi: jangka panjang, menengah dan tahunan serta mempunyai keterhubungan kerangka fikir yang jelas untuk setiap dokumen dan indikator pencapaian yang jelas setiap tahapannya. Oleh karena itu, dalam pemikiran analisis strategis harus juga dipertimbangkan masalah keuangan, teknologi, sumber alam, produk, pangsa dan posisi pasar, dan sebagainya.

Konsep dasar pariwisata adalah upaya penyajian pelayanan untuk menarik minat wisatawan dan tidak terlepas dari ketiga hal berikut ini:

1. Apa yang ingin mereka lihat dan kunjungi? (*what they want to see?*)
2. Apa yang ingin mereka makan? (*what they want to eat?*)
3. Apa yang ingin mereka beli? (*what they want to buy?*)

Untuk menjawab sederetan pertanyaan diatas, maka dalam program kerja tahun pertama perlu dilakukan :

1. Prioritisasi
2. Perumusan Rencana Tindak
3. Sinkronisasi RENJA SKPD dan RPJMD
4. Pelibatan dan Pengoptimalan Peran Multi Stakeholder

Jika semua upaya diatas dianggap belum mampu mendukung program pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Gorontalo, maka dalam program kerja tahun kedua dan seterusnya, semua SKPD terkait (lintas sektoral) harus lebih difokuskan pada pengembangan SDM secara terpadu. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas PARBUDKOMINFO dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah perangkat pendukung Media Center yang terbatas
2. Jaringan nirkabel yang tidak stabil.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan hambatan dan kendala dari permasalahan yang dihadapi di atas adalah :

1. Letak Media Center yang kurang strategis.
2. Ketidaktahuan masyarakat akan adanya fasilitas teknologi informasi yang ada di SKPD.

Langkah-langkah antisipatif :

1. Meningkatkan efektifitas Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ada di tiap wilayah untuk menjembatani kurangnya sarana akses internet bagi masyarakat.
2. Meningkatkan promosi layanan internet kecamatan guna terciptanya pemerataan akses informasi bagi masyarakat.

Pengembangan dan pembinaan kesenian dan kebudayaan yang berorientasi pada budaya lokal diharapkan dapat melestarikan budaya daerah dan meningkatkan minat serta kecintaan pada budaya itu sendiri. Disamping itu menjadi aset wisata yang dapat meningkatkan PAD. Pembinaan dan pengembangan kesenian budaya daerah, dengan indikator pembinaan sanggar seni, jumlah event kesenian dan budaya, jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Gorontalo. Indikator ini menunjukkan bahwa sesuai dengan target capaian yang ditetapkan, terdapat tingkat capaian yang rendah terutama jumlah pengunjung obyek wisata. Hal ini diakibatkan beberapa obyek-obyek wisata yang ada dalam kondisi rusak (*out of order*), sehingga mengurangi minat wisatawan.

Adapun hambatan atau kendala yang di hadapi:

1. Sebagian dari fasilitas yang ada sudah mengalami kerusakan.
2. Masih kurangnya event-event wisata yang bisa menarik minat pengunjung.
3. Promosi yang di lakukan masih kurang sehingga dari wisatawan sendiri masih banyak yang belum mengenal obyek yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Permasalahan yang di hadapi :

1. Minimnya informasi obyek wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo.
2. Terbatasnya SDM kepariwisataan.
3. Biaya pemeliharaan (*maintanance*) yang tinggi.

Langkah – langkah antisipatif Dinas Parbudkominfo adalah:

1. Meningkatkan promosi baik di dalam maupun di luar daerah.
2. Melakukan perbaikan fasilitas sehingga bisa menarik minat pengunjung.

Secara umum kondisi yang dihadapi oleh satker adalah permasalahan diatas. Namun disisi lain Dinas Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014 tetap melakukan inovasi-inovasi yang dikembangkan melalui kegiatan pelestarian nilai budaya diantaranya: Danau Limboto Carnival, Aneka Lomba dalam rangka Hari Ibu dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

4. Faktor Pendanaan

Program Kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo yang bersumber dari dana APBD / DAU setiap tahun anggaran. Untuk mengoptimalkan program Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo diharapkan agar lebih memprioritaskan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan.

Melalui perencanaan yang dituangkan dalam rencana kerja (Renja) maka diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika dapat berjalan optimal dengan prioritas anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan.

Strategi lain dari pemerintah daerah adalah menjalin kerjasama dengan pihak donor dan sponsorship. Dalam beberapa aspek strategis, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak donor dan sponshorship lainnya dalam upaya pemberdayaan SDM masyarakat. Langkah ini selain merupakan proses *transfer of knowlage* yang sangat efektif juga mengurangi beban pembiayaan. Pada umumnya lembaga donor lebih tertarik melakukan pemberdayaan dan

memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah jika program tersebut merupakan target jangka menengah dan panjang suatu daerah serta mempunyai alokasi pembiayaan terutama yang tidak dapat dibiayai oleh pihak donor.

Kerjasama dengan pihak sponsorship selain dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan kepariwisataan oleh masyarakat pelaku juga akan menambah jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Gorontalo. Salah satu contohnya adalah PEMDA memfasilitasi kerjasama masyarakat pelaku dengan penyedia jasa pariwisata (*Travel Agent*), mungkin hal ini akan sedikit sulit dilaksanakan jika tidak didukung sepenuhnya oleh pelaku-pelaku utama, misalnya saja, sebagai upaya untuk menarik minat wisatawan, biasanya travel agent akan menjual paket wisata murah, paket hemat dan sebagainya, dampaknya adalah mereka butuh diskon khusus dari pengelola penginapan, rumah makan, maskapai penerbangan, pelayanan, transportasi darat dsb. Namun demikian jika pemerintah melakukan pendekatan dengan arif dan bijaksana serta semua pelaku dilibatkan sejak perencanaan awal, maka hal ini bukanlah merupakan kendala utama yang harus ditakuti, malah konsep ini akan menguntungkan semua pihak.

Strategi Dinas Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas
2. Meningkatkan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah secara polistik
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi
5. Membuka peluang yang cukup untuk investasi pengembangan obyek – obyek wisata
6. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan obyek / kawasan wisata yang ada
7. Meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kepariwisataan
8. Meningkatkan SDM kepariwisataan

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo disesuaikan dengan adanya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo yaitu (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (2) Terwujudnya masyarakat Kabupaten Gorontalo yang sejahtera, (3) terwujudnya masyarakat Kabupaten Gorontalo yang mandiri. Oleh karena itu dinas pariwisata kebudayaan komunikasi dan informatika Kabupaten Gorontalo periode 2010 – 2015 diarahkan pada beberapa sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain adalah:

1. Mewujudkan pariwisata dan budaya yang berdaya saing nasional dan global serta membangun jaringan informasi dan komunikasi, pariwisata antara pusat dan daerah serta antara daerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai wujud dari pelaksanaan visi Pemerintahan Kabupaten dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Meningkatkan apresiasi seni dan budaya daerah sehingga mendorong terbukanya lapangan kerja dibidang kepariwisataan sebagai realisasi pelaksanaan visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Gorontalo yang sejahtera.

3. Meningkatkan komunikasi diberbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi dan informasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global sebagai realisasi dari pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam masyarakat Kabupaten Gorontalo yang mandiri.

PENUTUP

1. Bahwa masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang dapat menarik perhatian pengunjung untuk menikmati hal yang unik dilokasi objek wisata itu sendiri.
2. Belum adanya pementasan atau pagelaran tentang budaya di Kabupaten Gorontalo. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung terutama wisatawan nusantara bahkan wisatawan manca negara.
3. Belum adanya pelatihan ketrampilan masyarakat untuk menghasilkan kerajinan atau produk-produk seperti makanan yang dapat menunjang kepariwisataan.
4. Bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama di bidang kepariwisataan. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun citra pariwisata.
5. Bahwa masih banyak pegawai yang belum menguasai teknologi informasi, kurangnya sosialisasi pengurusan rekomendasi bagi para pengusaha jasa yang bergerak di bidang pariwisata, serta terbatasnya jumlah perangkat teknologi (komputer).

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, hani. 2008. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*, Refika Admitama, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 2002. *Budaya Organisasi*. Jakarta. Rineka Cipta
- Northouse, P.G. 2013. *Kepemimpinan Teori dan Praktik*. (Edisi Keenam), Jakarta: Indeks
- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rivai, Veithzal. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Robbins, Stephen P. 2002. *Perilaku Organisasi*. Edisi kelima. Alih Bahasa: Halida, Dewi sartika. Jakarta: Erlangga.
- Salusu, 2008. *Pengambilan Keputusan Stratejik Cetakan Kesepuluh*. Jakarta. Grasindo
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke 13, Alfabeta, Bandung

- Sunarsih, 2001. *Kepemimpinan Transformasional dalam Era Perubahan Organisasi*, Jurnal Manajemen & Bisnis. Vol 5 No.2 Desember 2001.
- Suranta,Sri. 2002. *Dampak Motivasi Karyawan pada Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Dengan Kinerja Karyawan Perusahaan Bisnis*. Empirika. Vol 15. No 2. Hal: 116-138
- Thoha, M. 2001. *Kepemimpinan Dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku*, Rajawali Press. Jakarta
- Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Wirawan. 2013. *Kepemimpinan. Teori Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian. (Contoh Aplikasi untuk Kepemimpinan Wanita, Organisasi Bisnis, Pendidikan dan Militer)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yukl, Gary. 1998. *Leadership in Organization*. Alih bahasa: Sampe Maselinus, Rita Tondok Andarika. Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- _____. 2010. *Kepemimpinan Dalam Organisasi (Edisi Kelima)*. Alih bahasa: Budi Supriyanto. Jakarta: PT. Indeks.